

Judul : Pemilu Berhasil Jika Capai 4 Indikator
Tanggal : Kamis, 25 Januari 2024
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 8

Jaga Kewibawaannya

Pemilu Berhasil Jika Capai 4 Indikator

KETUA Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyatakan, DPR juga punya kepentingan untuk mensukseskan Pemilu 2024. Pemilu ini semakin hari semakin berkualitas memenuhi prinsip-prinsip demokrasi yang Luber-Jurdil.

Dia bilang, DPR juga bekerja sama dengan banyak pihak menjaga kewibawaan pemilu. Untuk itu, pemilu ini bisa dikatakan berhasil apabila memenuhi setidaknya empat indikator capaian.

Indikator pertama, semua tahapan yang sudah dirancang oleh pemerintah dan DPR berjalan dengan sesuai rencana.

"Alhamdulillah kan sejauh ini tahapannya sudah berjalan dengan baik, tinggal beberapa

tahap lagi seperti kampanye yang sedang berjalan dan masa tenang, terakhir hari pencoblosan," terang Doli.

Kedua, tingkat partisipasi pemilih tinggi. Jadi, ketika masyarakat yang datang pada tanggal 14 Februari di hari pencoblosan itu makin banyak, artinya kesadaran masyarakat itu tinggi akan pentingnya memilih.

Hal itu merupakan hasil sosialisasi yang dilakukan Pemerintah pusat dan daerah, partai politik termasuk penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU.

"Setiap kami datang ke daerah bukan hanya penyelenggara saja yang kami undang tapi juga pemerintah daerah. Karena kita juga mau ngecek soal data pe-

milih yang dilakukan oleh KPU berkoordinasi dengan Dukcapil setempat," terang Doli.

Ketiga, apabila masyarakat yang datang ke TPS itu bisa memilih dengan nyaman dan aman tanpa terdistraksi dengan praktik-praktik *moral hazard* pemilu, misalnya money politics dan politik transaksional, sehingga mereka yang datang memilih dengan objektif atas pilihannya yang rasional tanpa ada gangguan dan intimidasi serta provokasi.

Indikator keempat, terpilihnya kontestan pemilu yang terbaik dari seluruh kontestan. Baik itu pemilihan Presiden, Wakil Presiden, Anggota DPR tingkat Pusat, Provinsi dan Kota/

Kabupaten.

Doli lalu menyoroti Alat Pemasangan Kampanye (APK) yang tidak sesuai dengan aturan. Pasalnya, di beberapa tempat sudah ada kejadian yang memakan korban akibat dari APK yang tidak sesuai dengan aturan.

"Soal kepemiluan itu sudah diatur di Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait pemasangan alat-alat kampanye. Di aturan itu sudah diatur bagaimana seberapa besar ukurannya, seberapa banyak dan di mana tempatnya. Bawaslu memang salah satu tugasnya mengawasi itu," kata Doli.

Ketika menemukan penyimpangan pemasangan APK, Bawaslu mesti segera bertindak

dengan merekomendasikan kepada pemerintah daerah segera ambil tindakan misalnya dengan mengerahkan Satpol PP. Kemudian juga bisa didorong, dibantu oleh pihak kepolisian setempat, bahkan masyarakat juga secara aktif bisa ikut memberikan laporan karena menjadi pihak yang terganggu.

"APK itu tujuannya kan baik, untuk memperkenalkan kontestan politik seperti capres, cawapres, partai politik dan caleg kepada masyarakat. Namun, jika mengancam jiwa masyarakat, jangan sampai tujuan baik itu jadi rusak gara-gara salah tempat dan salah pasang yang tidak sesuai dengan aturan," pungkas Doli. ■ KAL